

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMBANGUNAN DESA di DESA LODAYA KECAMATAN RANDUDONGKAL  
KABUPATEN PEMALANG**

**Khayrul Fiker D2B606023, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan,  
Universitas Diponegoro Semarang  
Pembimbing I Drs. Priyatno Harsasto, MA, Pembimbing II Dra. Rina Martini, M.Si**

**ABSTRAKSI**

Desa adalah unit penyelenggaraan pemerintah yang paling kecil dan justru karena unitnya yang kecil ini maka (secara teoritis) terbuka untuk mewujudkan gagasan demokrasi langsung. Upaya Pemerintah Desa dalam pembangunan desa secara *bottom up* pada hakekatnya tidak lain dari suatu upaya politik developmentalism di desa, yang penyelenggaraannya ditekankan pada dua aspek yaitu pertama, menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya; kedua, mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan ruang/peluang yang tercipta (Bintarto, 1989 : 13–15). Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang merupakan salah satu desa yang kurang memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, ini dilihat dengan adanya setiap pembangunan desa hanya orang-orang terdekat Kepala Desa saja yang ikut berpartisipasi, bahkan seseorang yang notabene sebagai Ketua BPD (Badan Perwakilan Desa) yang seharusnya menjadi jembatan apresiasi masyarakat ikut serta dalam pembangunan tersebut. Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang merupakan salah satu desa yang kurang memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, ini dilihat dengan adanya setiap pembangunan desa hanya orang-orang terdekat Kepala Desa saja yang ikut berpartisipasi, bahkan seseorang yang notabene sebagai Ketua BPD (Badan Perwakilan Desa) yang seharusnya menjadi jembatan apresiasi masyarakat ikut serta dalam pembangunan tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian kualitatif lebih berupaya memahami situasi tertentu yaitu meneliti tentang upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memuat gambaran mengenai situasi dan kejadian, ataupun termasuk proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh fenomena-fenomena yang ada.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Secara prosedural dan petunjuk pelaksanaan, rencana kerja dan rencana pembangunan secara tertulis untuk Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum bagi level pemerintahan desa/kelurahan; 2) Langkah yang dilakukan Pemerintah Desa Lodaya dengan memberikan kewenangan kepada Dusun untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing Dusun memberikan motivasi sendiri bagi masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan yang akan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa; 3) Faktor penghambat, ini menyebabkan pembangunan di Desa Lodaya sedikit ketinggalan dari desa lain yang lokasinya tidak jauh dari pusat Kecamatan Randudongkal; 4) Faktor pendukung merupakan aspek yang sangat mendukung untuk kemajuan desa terutama dari pembangunan.

Hasil pengamatan selama penelitian dan masukan dari para informan baik dari perangkat pemerintahan desa maupun masyarakat yang dilibatkan di dalam penelitian ini menjadi tolak ukur inisiatif selanjutnya, antara lain dengan memberikan keleluasaan masyarakat Desa Lodaya untuk ikut serta secara lebih aktif dan nyata dengan memberikan independensi yang lebih leluasa kepada mereka untuk memberikan sumbangan kepada pembangunan desa.

**Kata kunci:** Pembangunan, Partisipasi, Lodaya, Pembangunan Desa.

**LATAR BELAKANG**

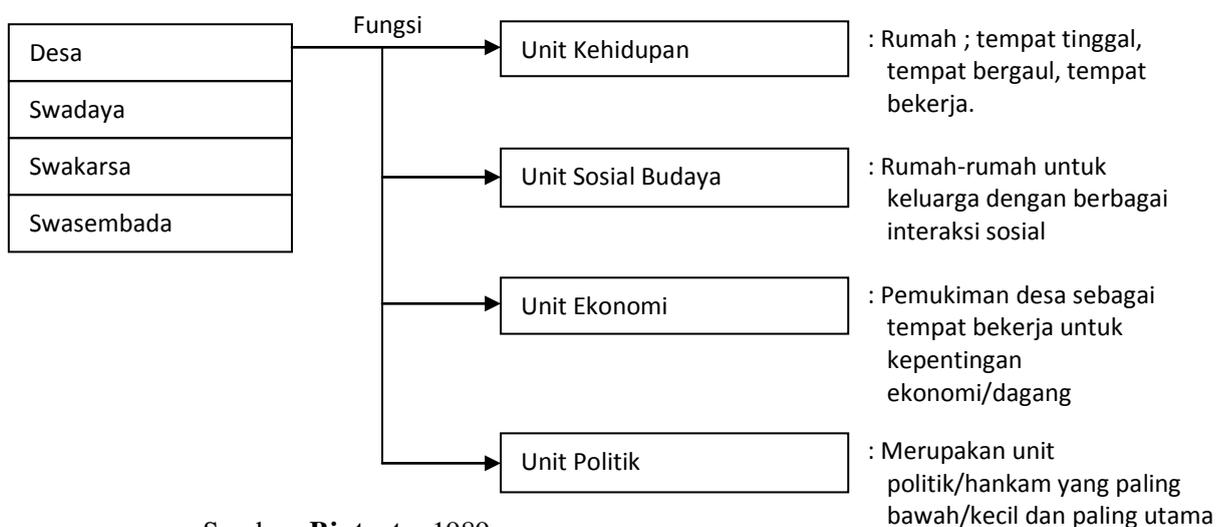
Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Hal ini menunjukkan

bahwa pembangunan sebagai suatu proses, yaitu kegiatan terus menerus dilaksanakan dalam tahap-tahap tertentu secara sadar dan terencana yang mengarah pada modernitas untuk mencapai tujuan negara.

Desa adalah unit penyelenggaraan pemerintah yang paling kecil dan justru karena unitnya yang kecil ini maka (secara teoritis) terbuka untuk mewujudkan gagasan demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini sifatnya lebih partisipatif dan lebih inklusif daripada demokrasi perwakilan. Jelasnya perwakilan rakyat dikembangkan di era modern ini untuk, antara lain, mengatasi jumlah penduduk dan cakupan teritorial yang sangat luas. Wacana pengembangan demokrasi di tingkat desa bukan hanya terkungkung oleh perundang-undangan yang ada, yakni Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan dibentuknya lembaga perwakilan rakyat, yakni Badan Perwakilan Desa (BPD), namun juga ditopang oleh realita besarnya jumlah penduduk di setiap desa. Upaya Pemerintah Desa dalam pembangunan desa secara *bottom up* pada hakekatnya tidak lain dari suatu upaya politik *developmentalism* di desa, yang penyelenggaraannya ditekankan pada dua aspek yaitu *pertama*, menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya; *kedua*, mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan ruang / peluang yang tercipta (Bintarto, 1989 : 13–15). Mobilisasi partisipasi masyarakat melemah, yang ada hanya partisipasi pelaksanaan kegiatan gotong-royong, finansial masyarakat untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan Pemerintah Desa. Oleh karena itu, partisipasi rakyat lebih diarahkan terutama pada penerapan program pembangunan yang dirancang oleh para elit penguasa. Pelaksanaan program pembangunan desa oleh pemerintah telah membuat desa dan penduduknya menjadi semakin tidak berdaya.

Pembatasan partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan pembangunan desa (Bangdes) berkaitan dengan masyarakat desa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1981 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Desa yang dalam pelaksanaannya cenderung bersifat *top down*, yang tidak menciptakan pilihan dan harapan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat sangat minimal. Terjadi penyimpangan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa bahwa kebijakan pembangunan desa (Bangdes) digunakan untuk program yang diprioritaskan kepada masyarakat desa.

Bagan 1.1.  
Pembinaan Pengembangan Desa



Sumber: **Bintarto**, 1989

Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang merupakan salah satu desa yang kurang memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, ini dilihat dengan adanya setiap pembangunan desa hanya orang-orang terdekat Kepala Desa saja yang ikut berpartisipasi, bahkan seseorang yang notabene sebagai Ketua BPD (Badan Perwakilan Desa) yang seharusnya menjadi jembatan apresiasi masyarakat ikut serta dalam pembangunan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA di DESA LODAYA KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG”

#### PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari pemaparan dan kenyataan di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Desa Lodaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan?
2. Faktor-faktor pendorong dan penghambat apa yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?

#### TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui upaya-upaya Pemerintah Desa Lodaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan mengetahui seberapa besar kemampuan masyarakat Desa Lodaya untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

#### KERANGKA TEORI

##### **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**

Partisipasi masyarakat merupakan hal terpenting dalam pembangunan desa, yaitu akan menjadi wahana pendidikan politik yang sangat baik. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi. Partisipasi masyarakat dapat dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa. Jika masyarakat desa tidak berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu proyek di desanya.

Salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk keterlibatan seseorang dalam berbagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dengan penelitian. Bentuk-bentuk partisipasi aktif sebagai usaha yang terorganisir oleh warga masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya *public policy*, sehingga kualitas dari hierarki partisipasi masyarakat dilihat dalam keaktifan atau kepasifan (apatitis) dari bentuk partisipasi masyarakat.

##### **Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Memberdayakan masyarakat melalui pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan. Pembangunan desa tidak menempatkan rakyat desa sebagai obyek, melainkan menempatkan rakyat desa pada posisi yang tepat sebagai subyek dalam proses pembangunan desa.

Menurut Bintarto (1989 : 111) pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga tahapan:

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
- b) Memperkuat potensi, daya, sumberdaya atau energi yang terdapat pada politik rakyat dan dimiliki masyarakat (*empowering*) dengan menyediakan input serta

pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya memanfaatkan peluang.

- c) Melindungi masyarakat dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Sedikit sekali sumbangannya dalam upaya menemukan strategi baru dalam bidang pembangunan yang berlandaskan kepentingan massa rakyat yang kini menjadi korban keterbelakangan. Upaya yang paling baik yang dilakukan adalah berusaha agar tidak mengaburkan struktur pemerasan dan penindasan yang dihasilkan oleh keterbelakangan dan yang pada gilirannya, mendukung kelangsungannya (Robert Chambers (terj), 1988 : 42).

### **Pembangunan Desa**

Program pembangunan desa untuk membuat rakyat semakin banyak punya pilihan tentang masa depan yang diinginkan. Proses pembangunan desa menghasilkan tata kehidupan masyarakat yang menumbuhkan demokrasi. Sehingga kebijakan Pemerintah terhadap program pembangunan pedesaan bertujuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, untuk meningkatkan kualitas kehidupannya dan kesejahteraan masyarakat desa. Berbagai program pembangunan desa dalam perencanaan partisipatif yang diterapkan oleh pemerintah yang secara umum untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian kualitatif lebih berupaya memahami situasi tertentu yaitu meneliti tentang upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memuat gambaran mengenai situasi dan kejadian, ataupun termasuk proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh fenomena-fenomena yang ada.

Metode deskriptif dimaksudkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan sebyek atau obyek penelitian, pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Hasil deskriptif dianalisis sebagai kualitatif untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan subyek dan obyek penelitian yang sesungguhnya di lapangan.

### **Sumber Data**

Di dalam penelitian ini data yang dipergunakan :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara, serta pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui laporan-laporan, buku-buku, atau data-data yang telah diolah, seperti data yang dipublikasikan baik dalam bentuk surat kabar atau majalah maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan pada jenis dan sumber data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah meliputi :

1. Indepth Interview

Merupakan data percakapan dengan narasumber untuk mendapatkan jawaban atau informasi yang akurat. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Desa Lodaya : Wardi, BA

- b. Badan Perwakilan Desa (BPD) Lodaya
    - Ketua : Bambang Kuncoro
    - Anggota : Gatot Mugiarto, S.Pd
  - c. Tokoh Masyarakat
    - Mantan Kepala Desa Lodaya : Drs. Tursilo Susanto
    - Ketua Pemuda Desa Lodaya : Krisanto
2. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen yang diperoleh dari kantor tata usaha Kabupaten Pemalang, kantor Kecamatan Randudongkal Pemalang, serta berbagai instansi yang berkaitan dengan upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik penganalisaan data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti mengolong-golongkan data dalam pola, tema, atau kategori yang telah ditentukan. Setelah data terkumpul selanjutnya disusun, diolah dan ditafsirkan. Tafsiran dalam penelitian kualitatif ini berarti memberikan makna kepada analisis dan menjelaskan konsep.

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data dengan langkah-langkah sbb:

Melakukan pengumpulan, pengorganisasian, penilaian, penyimpulan terhadap data yang ada. Karena data primer berasal dari hasil wawancara maka hasil wawancara itu akan dicocokkan dengan fakta di lapangan untuk kemudian hasil dari pencocokan itu diinterpretasikan oleh penulis untuk memperoleh kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat juga mengacu pada data sekunder yang ada. Dalam penelitian ini berpegang pada prinsip realitas, realibilitas, dan identitas sehingga hanya data yang relevan dengan penelitian ini saja yang dipakai.

### **Kondisi Demografi Kabupaten Pemalang**

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa, secara geografis Kabupaten Pemalang terletak diantara  $109^{\circ} 17' 30''$  -  $109^{\circ} 40' 30''$  Bujur Timur dan  $8^{\circ} 52' 30''$  -  $7^{\circ} 20' 11''$  Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Pemalang mencapai  $111.530 \text{ km}^2$ . Sebelah utara Kabupaten Pemalang berbatasan dengan laut Jawa, disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Dengan demikian Kabupaten Pemalang memiliki posisi strategis, baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan. Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi, bagian utara Kabupaten Pemalang merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 meter diatas permukaan laut, bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15 meter diatas permukaan laut dan bagian selatan merupakan dataran tinggi dan pegunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian berkisar 16-925 meter diatas permukaan laut yang merupakan bagian dari lereng gunung Slamet.

Secara administrasi Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 Kecamatan (Ampelgading, Bantarbolang, Belik, Bodeh, Comal, Moga, Pemalang, Petarukan, Pulosari, Randudongkal, Taman, Ulujami, Warungpring, Watukumpul) dan 222 Desa/Kelurahan. Disamping Kecamatan Pemalang, kecamatan lainnya yang cukup signifikan baik dalam sumber pendapatan asli daerah maupun dalam pembangunan daerah dimasing-masing Kecamatan sampai tingkat Kabupaten adalah Kecamatan Comal,

Kecamatan Moga, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Randudongkal, dan Kecamatan Ulujami.

### **Pembangunan Desa di Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal**

Konsep pembangunan “dari bawah” kini bukan lagi hal baru, bahkan istilah ini sering dibicarakan diberbagai seminar nasional karena istilah “istilah perencanaan dari bawah” sama dengan “partisipasi masyarakat”. Pembangunan yang dilakukan ini pada dasarnya untuk kepentingan rakyat, seperti halnya yang dilakukan Pemerintahan Desa Lodaya dalam merencanakan pembangunan desa.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Mekanisme Rencana Pembangunan**

Di dalam prakteknya, kerangka ideal yang telah disusun sedemikian rupa ternyata belum dapat terlaksana secara sempurna, atau seperti yang diharapkan. Pengembangan potensi daerah Desa Lodaya terkendala oleh kesulitan akses masyarakat menuju sumber-sumber informasi. Memang benar bahwa sarana penunjang pembangunan, seperti jalan dan transportasi menuju Desa Lodaya tidak dapat dijadikan sebagai alasan klasik jika para pelaksana program mengambil langkah yang proaktif dengan cara mendekati masyarakat desa tersebut. Keengganan aparat pemerintah terkait untuk bersikap “mengalah” membuat sebagian masyarakat Desa Lodaya tidak tersentuh oleh kemajuan. Kecenderungan yang terjadi ialah bahwa penyebaran informasi terkait pembangunan masyarakat hanya menyentuh daerah-daerah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Randudongkal.

### **Pihak-Pihak yang Berpartisipasi**

Tahapan proses perencanaan pembangunan di atas belum di laksanakan seutuhnya dalam proses perencanaan pembangunan Kecamatan Randudongkal. Tahapan yang belum dilaksanakan antara lain tahap pelaksanaan: (1) Verifikasi oleh tim delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan desa/kelurahan menurut masing-masing SKPD; (2) Pembagian peserta musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi SKPD atau gabungan yang tercantum; (3) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta musrenbang Kecamatan namun belum diusulkan oleh Desa/Kelurahan (kegiatan lintas desa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan); (4) Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi SKPD atau gabungan SKPD; (5) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD; (6) Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok SKPD atau gabungan SKPD diharapkan seluruh peserta musrenbang Kecamatan.

Menurut salah seorang peserta musrenbang di Kecamatan Randudongkal yang mewakili Desa Lodaya keterlibatan unsur masyarakat dalam musrenbang kecamatan masih rendah, hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya informasi penyelenggaraan musrenbang kepada masyarakat dan memang unsur masyarakat tersebut tidak diundang secara tersendiri oleh kecamatan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, belum ada pemahaman yang mendalam dari pihak pemerintahan desa setempat tentang mekanisme perencanaan pembangunan belum disosialisasikan dengan baik kepada pemerintah desa dan masyarakatnya, sehingga mekanisme yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan menggunakan cara yang turun temurun dari kades periode sebelumnya. Hal ini disebabkan ketercukupan aparat yang rendah, dan rendahnya keterampilan komunikasi kepada masyarakat.

### **Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakatnya**

Perencanaan partisipatif tidak sekedar didasarkan pada “daftar keinginan” pihak tertentu, melainkan benar-benar berbasis kebutuhan nyata seluruh masyarakat dengan strategi jelas dan terarah.

Dalam kasus Desa Lodaya, pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan seleksi masalah dan kebutuhan tersebut dilaksanakan di salah seorang rumah warga yang dapat menampung banyak jumlah peserta, yang dihadiri oleh Ketua RT, perangkat RT, dan seluruh warga di lingkungan RT yang bersangkutan. Kebutuhan masyarakat Desa Lodaya berbeda-beda dari setiap Dusunnya, hal ini dapat dilihat dari: 1) Dusun Babakan membutuhkan adanya pembuatan dan perbaikan jalan setapak dari pemukiman sampai ke sungai; 2) Dusun Sampi membutuhkan perbaikan jembatan yang menghubungkan Dusun Sampi ke pusat pemerintahan desa dan pengaspalan jalan untuk mempermudah aktifitas warga baik tingkat Dusun maupun tingkat Desa; 3) Dusun Lodaya Krajan membutuhkan gapura selamat datang karena Dusun Lodaya Krajan adalah Ibukota Desa dan perbaikan saluran air dari sungai ke sawah-sawah warga; 4) Dusun Mijen membutuhkan perbaikan talud untuk menghindari adanya longsor dan saluran air untuk pembuangan air dari pemukiman ke sungai, karena pada waktu hujan turun di Dusun Mijen terdapat genangan air yang cukup besar sehingga masuk kerumah warga.

Untuk kebutuhan pemerintah desa, perlu adanya perbaikan Kantor Kepala Desa (Balai Desa) yang sudah mulai rusak dari bangunan sampai sarana yang ada, seperti tempat parkir, balai pertemuan, kamar mandi sampai dapur. Untuk itu pemerintah desa sedikit lebih memprioritaskan perbaikan Kantor Kepala Desa (Balai desa) karena pembangunan ini yang dianggap lebih mudah dan murah.

### **Pembahasan Kebutuhan Masyarakat**

Dari hasil identifikasi kebutuhan masyarakat Desa Lodaya yang dilakukan oleh pemerintah desa mulai dari tingkat RT sampai tingkat Desa, terdapat kebutuhan-kebutuhan yang cukup mendesak dan secepatnya harus dilaksanakan untuk kepentingan warga.

Warga merasa tidak ada tindak lanjut dari pihak pemerintah, menganggap pemerintah sekedar menjalankan rutinitas untuk mengisi jadwal kegiatan. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah setempat untuk menghapus citra negatif ini ialah dengan mewujudkan dan menindaklanjuti masukan-masukan yang diberikan oleh warga hasil diskusi kebutuhan bersama mereka dengan menggunakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan paling mendesak dan yang sesuai dengan anggaran yang tersedia – jika kebutuhan tersebut menyangkut pembiayaan.

Penyebab lain dari rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan pembahasan kebutuhan masyarakat adalah kegiatan tersebut dirasakan warga tidak memberikan perbaikan dalam kehidupan warga. Kebutuhan masyarakat yang diusulkan tidak disertai upaya pemecahan oleh Pemerintah Desa Lodaya, sehingga hasil kegiatan penyelidikan/identifikasi kebutuhan masyarakat hanya merupakan daftar kebutuhan masyarakat Desa Lodaya saja, ini yang membuat sebagian warga enggan menghadiri kembali kegiatan pembahasan kebutuhan masyarakat di tahun berikutnya. Padahal kegiatan kebutuhan masyarakat tersebut sangat penting untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan kebutuhan yang dihadapi masyarakat yang nantinya akan diajukan sebagai usulan prioritas dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa, Kecamatan dan seterusnya.

### **Faktor Penghambat**

- 1) Lambatnya respon Pemerintah Desa Lodaya terhadap kebutuhan masyarakat  
Pemerintah Desa yang lambat dalam merespon kebutuhan masyarakat mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan

pemerintah desa rendah. Kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi khususnya kebutuhan dalam pembangunan desa yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan rendah.

2) Kondisi jalan yang kurang baik

Kondisi jalan merupakan salah satu faktor utama kegiatan itu berjalan lancar atau tidak. Melihat kondisi jalan dimasing-masing Dusun yang ada di Desa Lodaya sangat memungkinkan tingkat partisipasi masyarakat rendah karena akses ke masing-masing Dusun sedikit terhambat.

3) Keterbatasan ruang gerak masyarakat

Pada dasarnya masyarakat Desa Lodaya bersedia ikut menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan desa tetapi pemerintah Desa Lodaya cenderung menutup ruang gerak masyarakat untuk ikut bergabung. Pasifnya masyarakat dalam perencanaan pembangunan berdampak pada pelaksanaan pembangunan yang kurang didukung oleh masyarakat meskipun pembangunan ini untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sampai saat ini ruang gerak masyarakat dibatasi oleh pemerintah desa dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan pemerintah desa, sehingga masyarakat hanya mau ikut berpartisipasi apabila pembangunan itu dilaksanakan oleh panitia pembangunan di Dusun masing-masing meskipun masih dalam koordinasi Desa.

4) Keterbatasan biaya

Masalah biaya adalah masalah klasik dalam setiap melaksanakan kegiatan, hal ini juga yang membuat pembangunan di Desa Lodaya mengalami lambat. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan kemajuan desa harus terbagi untuk 4 Dusun. Untuk pembangunan dimasing-masing Dusun, subsidi dari pemerintah desa hanya 20% dari jumlah biaya yang dibutuhkan dan untuk sisanya panitia pembangunan yang dibentuk di masing-masing Dusun bertanggung jawab atas kekurangannya

### **Faktor Pendorong**

1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni

Menurut data yang ada penduduk Desa Lodaya dilihat dari tingkat pendidikan cukup mumpuni untuk menyumbangkan pikirannya dalam proses pembangunan yang ada. Dengan SDM yang dimiliki Desa Lodaya seharusnya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah desa sedikit lebih ringan karena masyarakat Desa Lodaya dapat memperhitungkan mana kebutuhan yang harus diprioritaskan lebih dulu.

2) Kemauan yang kuat dari masyarakat

Pada dasarnya masyarakat Desa Lodaya mempunyai kemauan yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, ini ditunjukkan dengan aktifnya kegiatan kerja bhakti setiap hari jumat tepatnya setelah Sholat jumat. Dalam kerja bhakti ini, tidak hanya bapak-bapak atau para pemuda saja tetapi ibu-ibu dan para pemudi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

3) Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda di setiap Dusun membuat pemerintah desa memikirkan pembangunan yang lebih prioritas dan tidak menyimpang dari kebutuhan masyarakat yang ada. Setelah kebutuhan masyarakat teridentifikasi, secepatnya pemerintah desa merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan.

4) Desa Lodaya merupakan kawasan yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satunya ialah agrowisata mengingat desa tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam khususnya dalam

bidang pertanian. Dusun Sampi merupakan satu-satunya Dusun yang ada di Kecamatan Randudongkal yang sudah menjadi Dusun agrowisata dalam bentuk perkebunan, karena letaknya yang berada di daerah perbukitan. Dengan adanya Dusun agrowisata ini, pembangunan yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, karena untuk menunjang adanya Dusun Sampi sebagai Dusun agrowisata dan untuk menjual keindahan yang dimiliki Dusun Sampi ini.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan:

1. Secara prosedural dan petunjuk pelaksanaan, rencana kerja dan rencana pembangunan secara tertulis untuk Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum bagi level pemerintahan desa/kelurahan.
2. Langkah yang dilakukan Pemerintah Desa Lodaya dengan memberikan kewenangan kepada Dusun untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing Dusun memberikan motivasi sendiri bagi masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan yang akan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
3. Faktor penghambat (lambatnya respon pemerintah desa, kondisi jalan yang kurang baik, keterbatasan ruang gerak masyarakat dan keterbatasan biaya), ini menyebabkan pembangunan di Desa Lodaya sedikit ketinggalan dari desa lain yang lokasinya tidak jauh dari pusat Kecamatan Randudongkal. Faktor penghambat ini saling terikat. Oleh karena itu, untuk menciptakan pembangunan yang lancar dan baik, faktor penghambat yang ada diselesaikan dan dibenahi satu persatu demi kelancaran pembangunan yang akan dilaksanakan.
4. Faktor pendukung (SDM yang mumpuni, kemauan yang kuat dari masyarakat, pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, desa yang berpotensi untuk dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah) merupakan aspek yang sangat mendukung untuk kemajuan desa terutama dari pembangunan. Kebutuhan masyarakat yang dipenuhi dan didukung oleh SDM yang mumpuni membuat masyarakat aktif dalam setiap program yang direncanakan pemerintah desa. Tidak menutup kemungkinan Desa Lodaya menjadi salah satu desa yang menjadi contoh baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten dalam aspek pembangunan desa.

### **Saran**

Hasil pengamatan selama penelitian dan masukan dari para informan baik dari perangkat pemerintahan desa maupun masyarakat yang dilibatkan di dalam penelitian ini menjadi tolok ukur inisiatif selanjutnya, antara lain dengan memberikan keleluasaan masyarakat Desa Lodaya untuk ikut serta secara lebih aktif dan nyata dengan memberikan independensi yang lebih leluasa kepada mereka untuk memberikan sumbangan kepada pembangunan desa. Implementasi rencana kerja pembangunan hendaknya dijalankan dan disosialisasikan dengan cara dan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat kebanyakan. Pemerintah desa yang memperhatikan kebutuhan masyarakatnya merupakan contoh yang baik. Tidak hanya memperhatikan potensi dari desanya, tetapi memperhatikan kemampuan masyarakatnya dalam keikutsertaan baik perencanaan maupun pelaksanaan merupakan hal penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, memberikan ruang gerak kepada masyarakat merupakan hal utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bintarto, R. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Chambers, Robert. 1988. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Terjemahan: M. Dawam Rahardjo. LP3ES. Jakarta.
- Gaffar, Afan. 1983. *Beberapa Aspek Pembangunan Politik*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Kansil C.S.T. 1982. *Peraturan Tata Pemerintahan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Marsono. 1994. *Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan di Daerah*. Djembatan. Jakarta.
- Pamudji, S. 1982. *Perbandingan Pemerintahan*. Bina Aksara. Jakarta.
- Santoso, Purwo dkk. 2002. *Merubah Watak Negara, Strategi Penguatan Partisipasi Desa*. Lappera Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Sarundajang. 2003. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Siagian, H. 1989. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius. Yogyakarta.
- Soemardi, Soelaeman. 1984. *Cara-cara Pendekatan Terhadap "Kekuasaan" Sebagai Suatu Gejala Sosial* dalam buku Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Sudarsono, Juwono. 1985. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Sujamto dkk. 1991. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sunindhia, Y, W. 1996. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

### **Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.